

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Auditing

2.1.1 Pengertian Auditing

Sukrisno Agoes (2012:4) pengertian Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Alvin A. Arens (Arens dkk 2011:4) mendefinisikan auditing adalah Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan criteria yang telah ditetapkan auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Mulyadi (2011) Mengatakan bahwa : “Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Sedangkan dalam hal ini, menurut PSAK pengertian auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan (asersi) tentang berbagai aktivitas dan kejadian-kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan (asersi) dengan kenyataan yang ada dilapangan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi.

Dari pengertian auditing yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu pengumpulan dan pengevaluasian bukti oleh pihak yang kompeten dan independen mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, serta memeriksa keterkaitan antara laporan keuangan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut serta temuan auditor dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Jenis-jenis Auditing

Soekrisno Agoes, (2012) Audit bisa dibedakan atas :

a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar professional Akuntan Publik atau ISA atau panduan Audit Entitas bisnis kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Public serta Standar Pengendalian Mutu.

b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditan) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap pembayaran hutang usaha diperusahaan. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap pembayaran hutang usaha diperusahaan.

2.1.3 Standar Auditing

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan criteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar Auditing yang berbeda dengan prosedur auditing berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Institute Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2)

Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAPI (Institute Akuntan Publik Indonesia) adalah sebagai berikut :

a) Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai Auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh Auditor.
3. Dalam pelaksanaan Audit dan penusunan laporannya, Audit wajib menggunakan kewajiban profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus disurvei dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sikap pada saat lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit.

c) Standar Pelaporan

1. Laporan Auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan Auditor harus menunjukkan dan menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan Standar Akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. (IAPI, 2011:105.1 & 150.2)

2.1.4 Bukti Audit

Arens, Elder, dan Beasley (2011:231-238), Bukti Audit dikatakan “sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan”. Berikut merupakan jenis-jenis bukti audit yang terbagi menjadi delapan kategori, yaitu :

1. Pemeriksaan Fisik

Inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud oleh auditor, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah asset benar-benar ada.

2. Konfirmasi

Penerimaan jawaban tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen dalam memverifikasi akurasi informasi yang diminta oleh auditor. Idealnya konfirmasi merupakan dokumen yang dibuat oleh klien yang dikirimkan oleh auditor dan diterima langsung oleh auditor tanpa melalui perusahaan.

3. Dokumentasi

Merupakan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang mendukung transaksi yang dicatat oleh klien dan pemeriksaan catatan klien sebagai bukti dari informasi yang telah didapat atau yang seharusnya ada dilaporan keuangan.

4. Prosedur Analitis

Merupakan bahan bukti yang menggunakan perbandingan dan analisis hubungan sebab akibat untuk menentukan apakah saldo akun disajikan secara layak oleh klien.

5. Wawancara dengan Klien

Bertanya jawab dengan klien bertujuan untuk mendapatkan informasi tertulis atau lisan dari klien. Tanya jawab biasanya tidak dijadikan dasar dalam kesimpulan tentang klien karena jawaban yang diperoleh auditor berasal dari pihak yang tidak independen dan mungkin memihak kepentingan klien.

6. Rekalkulasi

Melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar dimuka.

7. Pelaksanaan Ulang

Mencakup pengecekan ulang suatu sampel perhitungan dan perpindahan informasi yang dilakukan oleh klien selama periode audit.

8. Observasi

Penggunaan panca indera serta akal untuk menilai aktivitas tertentu, jenis bahan bukti audit ini juga memerlukan tindak lanjut dengan bukti-bukti yang lebih menguatkan.

2.2 Tahapan Audit

Mulyadi, (2011:121-122) sebelum audit laporan keuangan dilaksanakan, auditor perlu mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau menolak perikatan audit (audit engagement) dari calon kliennya. Auditor akan memutuskan untuk menerima perikatan audit calon kliennya dengan melaksanakan beberapa tahap. Tahapan audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap berikut ini, yaitu :

2.2.1 Penerimaan Perikatan Audit

Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor, ikatan perjanjian tersebut dalam bentuk perikatan audit.

Mulyadi, (2011:130) surat perikatan audit berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesempatan untuk reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang diterbitkan oleh auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien juga menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan auditor dan auditor sanggup melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang.

2.2.2 Perencanaan Audit

Langkah berikut setelah auditor menerima perikatan audit dari kliennya adalah perencanaan audit. Keberhasilan menyelesaikan perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Tujuh tahap yang perlu ditempuh oleh auditor didalam merencanakan pekerjaan audit atas laporan keuangan yaitu :

A. Memahami Industri dan Bisnis Klien

Sebelum auditor melakukan verifikasi dan analisis transaksi atau akun-akun tertentu, ia perlu mengenal lebih baik industri tempat klien berusaha serta kekhususan bisnis klien.

B. Melaksanakan Prosedur Analitik

Prosedur analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau ratio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat, di bandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor.

C. Membandingkan Tingkat Materialitas Awal

Pada tahap perencanaan audit, auditor perlu mempertimbangkan materialitas awal pada dua tingkat berikut ini yaitu tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Materialitas awal ada tingkat laporan keuangan perlu ditetapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajiban laporan keuangan ditetapkan pada laporan keuangan secara seluruhan.

D. Mempertimbangkan Resiko Bawaan

Sejak perencanaan audit sampai dengan penerbitan laporan audit, auditor harus mempertimbangkan berbagai macam resiko. Pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan resiko bawaan (*inherent risk*), yaitu suatu resiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun. Pada tahap pemahaman dan pengujian pengendalian intern, auditor harus mempertimbangkan resiko pengendalian (*control risk*), yaitu suatu resiko tidak dapat dicegahnya salah saji material dalam suatu saldo akun oleh pengendalian intern. Auditor harus mempertimbangkan resiko deteksi (*detection risk*), yaitu suatu resiko tidak terdeteksinya salah saji material dalam suatu saldo akun asersi tentang suatu saldo akun oleh prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor.

E. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan audit dengan klien berupa audit tahun pertama.

Dalam suatu perikatan audit tahun pertama, sebelumnya auditor tidak memperoleh bukti audit yang mendukung saldo awal. Jika laporan keuangan tahun sebelumnya tidak diaudit atau jika auditor tidak dapat memperoleh keyakinan dari review terhadap kertas kerja auditor terdahulu, ia harus memperoleh bukti audit yang kompeten yang cukup untuk mendukung asersi yang terkandung dalam saldo awal, sepanjang saldo-saldo tersebut berdampak terhadap laporan keuangan tahun berjalan.

F. Mengembangkan Saldo Awal terhadap Asersi Signifikan

Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor adalah untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang terendah, untuk mendukung pendapatan apakah, dalam semua hal yang material, laporan keuangan disajikan secara wajar. Tujuan ini diwujudkan melalui pengumpulan dan evaluasi bukti tentang asersi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

G. Memahami pengendalian intern klien

Langkah pertama dalam memahami pengendalian intern klien adalah dengan mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut. Jika auditor telah mengetahui bahwa pengendalian intern klien dibidang tertentu adalah kuat, maka ia akan mempercayai informasi keuangan yang dihasilkan, oleh karena itu, ia akan mengurangi jumlah bukti yang dikumpulkan dalam audit yang bersangkutan dalam bidang tersebut.

2.2.3 Pelaksanaan Pengujian Audit

Dalam mengaudit, auditor melakukan berbagai macam pengujian, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga golongan berikut ini :

a. Pengujian Analitik (*Analytical Test*)

Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara memperbandingkan dan menghubungkan antara data yang satu dengan yang lain.

Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif. Sebelum auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap

objek audit, ia harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang diaudit.

Untuk itu analisa ratio, analisa laba bruto, analisa terhadap laporan keuangan perbandingan (*comparative financial statement*) merupakan cara yang umumnya ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan secara garis besar mengenai keadaan keuangan dan hasil untuk klien.

b. Pengujian pengendalian (*Test Of Control*)

Pengujian pengendalian merupakan prosedur yang dirancang untuk memverifikasi pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian terutama ditunjuk untuk mendapat informasi mengenai :

1. Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian
2. Mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian
3. Karyawan yang melaksanakan pengendalian aktivitas

c. Pengujian substantif (*Subtantif Test*)

Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan adanya kesalahan moneter yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang didapat dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan dalam :

- a. Penerapan prinsip akuntansi secara berterima di Indonesia
- b. Tidak ditetapkannya prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia
- c. Ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia
- d. Ketidak tepatan pisah batas (*cut off*) pencatatan transaksi

- e. Perhitungan (penambahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian)
- f. Pekerjaan penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi
- g. Pencantuman pengungkapan (*disclosure*) unsur tertentu dalam laporan keuangan

2.2.4 Laporan Audit

Mulyadi (2011;12), laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam mengkomunikasikan dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf : Paragraf pengantar (*Introductory Paragraph*), Paragraf lingkungan (*Scope Paragraph*), dan Paragraf pendapat (*Opinion Paragraph*).

Dalam Paragraf pendapat auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Menurut Mulyadi (2011;12) ada empat tipe pokok laporan audit, yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya auditor menemukan salah satu sampai empat, yaitu : lingkup audit dibatasi oleh klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat mempengaruhi informasi penting karena kondisi-kondisi yang berbeda diluar kekuasaan klien maupun auditor, Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip yang berterima umum, Prinsip yang berterima umum dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

3. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perubahn klien.

4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclamer Opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no Opinion report*). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah batasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit dan auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.3 Teori Akuntansi

2.3.1 Pengertian Hutang Usaha

Agoes (2012) Hutang Usaha yaitu kewajiban pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan satu tahun. Atau Hutang Usaha yaitu merupakan hutang yang

berasal dari pembelian suatu barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan.

Arens di buku “Auditing dan Jasa Insurance (Pendapatan Terintegrasi) 2011” bahwa hutang adalah kewajiban yang belum dibayar atas barang dan jasa yang diterima dalam peristiwa bisnis yang biasa.

Hanafi (2010;29) bahwa “ Hutang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer asset atau memberikan jasa ke pihak lain dimasa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian dimasa lalu. Hutang dapat muncul disebabkan karena adanya penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam”.

Sedangkan liabilitas kontijensi didefinisikan dalam PSAK 57 (2012) sebagai (paragraph 10) :

1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih dimasa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan.
2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena : (a) Tidak terdapat kemungkinan besar perusahaan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya. (b) Jumlah kewajiban tersebut tidak biasa diukur secara andal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hutang usaha adalah suatu transaksi pembelian barang, perlengkapan, atau jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan secara kredit dalam jatuh tempo satu tahun.

Hutang usaha sangat penting maka dari itu diperlukan adanya pemeriksaan yang baik dalam sebuah perusahaan. Selain itu, hutang usaha juga sangat sensitive

untuk diketahui banyak orang. Serta terdapat dua metode pencatatan utang, yaitu *account payable procedure* dan *vocher payable procedure*.

a. Account payable procedure

Merupakan catatan Hutang berupa kartu hutang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur, yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran dan saldo utang.

b. Vocher payable procedure (Tidak menggunakan kartu utang)

yaitu menggunakan arsip *vocher* yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang. Hutang usaha muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerimaan jasa atau akuisisi hak aktiva dalam pembayaran atasnya.

Periode pelunasan kredit ini biasanya ditemukan dalam persyaratan penjualan (misalnya, 2/10, n/30 atau 1/10, E.O.M) dan biasanya 30 sampai 60 hari.

Kebanyakan perusahaan mencatat kewajiban atas pembelian barang ketika barang tersebut diterima. Jika hak telah beralih kepihak pembeli sebelum barang diterima, maka transaksi itu harus dicatat pada saat hak beralih ke pembeli.

Perhatian terus diberikan pada transaksi yang terjadi mendekati akhir darinsuatu periode akuntansi serta pada awal periode berikut untuk memastikan bahwa pencatatan barang diterima (persediaan) telah sesuai dengan kewajiban (Hutang Usaha) dan keduanya telah dicatat ke periode yang tepat.

Pengukuran jumlah hutang usaha tidak memiliki kesulitan tertentu. Faktur yang diterima kreditor telah menjelaskan tanggal jatuh tempo dan pengeluaran uang yang tepat, yang dilakukan untuk melunasi hutang itu.

2.3.2 Tujuan Audit Atas Hutang Usaha

Tujuan audit Hutang Usaha secara keseluruhan menurut Arens (2011:251) adalah untuk menentukan apakah saldo hutang telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak.

Auditor juga harus membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengungkapkan salah saji Hutang usaha serta beban akun. Karena akun berganda, dan salah saji akun biasanya juga dapat menimbulkan salah saji yang sama pada Hutang Usaha.

Oleh karena itu, membandingkan beban saat ini seperti sewa, utilitas, dan tagihan lainnya yang terjadwal secara teratur dengan tahun sebelumnya, merupakan suatu prosedur yang efektif untuk menganalisis hutang usaha apabila beban dari tahun ke tahun relative stabil.

Dan pada umumnya menyajikan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan prosedur pengujian atas rincian saldo adalah untuk akun Hutang Usaha. Dalam prosedur audit hutang usaha auditor menggunakan banyak variasi tergantung pada sifat entitas, materialitas hutang usaha, dan sifat efektifitas pengendalian internal, serta resiko intern.

Arens (2011:253) Menyatakan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo hutang usaha yaitu :

1. Saldo hutang usaha di trial balance sesuai dengan saldo di buku besar (*detail tie-in*). Yaitu menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari hutang usaha, menelusuri ke buku besar, menelusuri setiap faktur vendor ke file utama menyangkut nama dan jumlah.
2. Hutang yang tercatat benar-benar ada (*existence*). Yaitu menelusuri dari daftar hutang usaha ke faktur dan laporan vendor, mengkonfirmasi hutang usaha, dengan menekankan jumlah yang besar dan tidak biasa.

3. Seluruh hutang saham telah tercatat di neraca (*completeness*). Yaitu melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode.
4. Hutang usaha telah tercatat secara akurat (*accuracy*). Yaitu melaksanakan prosedur yang sama seperti yang digunakan untuk tujuan eksistensi dan pengujian kewajiban setelah periode.
5. Hutang usaha telah diklasifikasi dengan benar (*Classification*). Yaitu meriview daftar dan file induk untuk pihak terkait, wesel atau kewajiban berbunga lainnya, Hutang jangka panjang dan saldo debit.
6. Hutang usaha telah disajikan pada nilai yang dapat direalisasi dan pembayaran dicatat pada periode yang tepat (pisah batas atau *cut off test*). Yaitu melaksanakan kewajiban setelah periode, melaksanakan pengujian yang rinci sebagai bagian dari pengamatan fisik persediaan.
7. Perusahaan memiliki hak dan kewajiban untuk membayar terhadap hutang usaha yang dimilikinya (kewajiban). Yaitu memeriksa laporan vendor mengkonfirmasi utang usaha.

2.3.3 Prosedur Pemeriksaan Hutang Usaha

Sutrisno Agoes, dalam buku “Auditing (Pemeriksaan Akuntan) 2012 prosedur pemeriksaan Hutang Usaha adalah :

1. Pelajari dan evaluasi internal control atas hutang usaha.
2. Untuk hutang usaha cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger hutang usaha (jika jumlah supliernya banyak tidak usah 100%)
3. Secara test basis (*sampling*), periksa saldo pendukung dari hutang kepada beberapa supplier, perhatikan angkanya apakah cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report dan supplier invoice. Periksa

juga perhitungan matematis (*mathematical accuary*) dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang.

4. Seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang.
5. Pertimbangan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang saldonya besar maupun yang saldonya yang tidak berubah sejak tahun sebelumnya.
6. Periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) (*subsequent payment*) untuk mengetahui apakah ada liabilitas yang belum dicatat (*unrecorded liabilities*) per tanggal laporan posisi keuangan (neraca) dan untuk menyakinkan diri mengenai kewajaran saldo liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan (neraca).
7. Seandainya ada hutang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overdraft, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan excerpt dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut.
8. Seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afisiliasi, yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut.
9. Seandainya ada saldo debit dari utang usaha maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli tetapi sudah dilunasi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar (material) harus direklasifikasi sebagai piutang.